

PEMANFAATAN WEBSITE SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA DAN PEMANFAATAN DIGITALISASI PADA PENDIDIKAN ISLAM

Wulan Ayu Rahmadhani, David King, Embarina Melviyani Br Ginting, Fernandes Diego Sijabat, Rahmad Raviqy, Muhammad Amin

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

dsiagian242@gmail.com, embarinamelviyani@gmail.com, fd850735@gmail.com,
30.0130@praja.ipdn.ac.id, wulanrahmadhanii61@gmail.com, aminlombok77@gmail.com

ABSTRACT

The North Sumatra Provincial Social Service uses the website as a form of digitizing public services. However, in its use, there is still information sharing that cannot be accessed by the public due to the error menu feature, besides that social media owned by the North Sumatra Provincial Social Service is considered to be still less active in disseminating existing information and is still less interactive. with society. After the research conducted, it turns out that there are many factors that cause this problem to arise. The purpose of this study was to find out and provide an overview of the use of the website to provide services to the community at the Social Service of North Sumatra Province. This research is a qualitative descriptive study. Utilization of the website has not been supported by the three elements of digitizing public services in the implementation of e-government. In addition, the utilization of the website has not been supported by adequate human resource capabilities, the information presentation of the website has not provided sufficient updated information. The conclusion of the research is that the use of the website as a form of digitizing public services in the social service of the North Sumatra Province has been carried out well but still needs to improve the availability of infrastructure and increase the capacity and skills of human resources, especially in managing the social service site of the North Sumatra Province.

Keywords: *Digitization, Social Service, service, utilization, website*

ABSTRAK

Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara memaksimalkan penggunaan website sebagai pengaplikasian dari digitalisasi pelayanan kepada publik. Namun, dalam pemanfaatannya, terdapat berbagai masalah yang timbul seperti masih ada informasi yang tidak dapat diakses, selain itu media sosial yang dimiliki oleh Dinas sosial provinsi Sumatera Utara dinilai masih kurang aktif dalam menyebarkan informasi yang ada serta masih kurang interaktif dengan masyarakat. Setelah penelitian yang dilakukan ternyata banyak sekali faktor penyebab masalah tersebut muncul. Tujuan penelitian ini secara gamblang ialah untuk mengetahui dan memberikan gambaran umum tentang pemanfaatan website untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pemanfaatan website belum didukung oleh tiga elemen digitalisasi pelayanan publik dalam pelaksanaan *e-government*. Selain itu, penggunaan website juga belum ditopang dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terbilang mumpuni, sajian informasi website juga belum menyediakan informasi yang dinilai *up to date*. Kesimpulan dari penelitian adalah, pemanfaatan website sebagai bentuk digitalisasi pelayanan publik di Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara sudah terlaksana dengan baik, kemudian pengaruhnya terhadap pendidikan Islam tetapi dinilai perlu adanya upaya memaksimalkan keterbatasan infrastruktur dan peningkatan keahlian juga keterampilan skill daripada sumber daya manusia terutama dalam pengelolaan website dinas sosial provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Digitalisasi, Dinas Sosial, Pelayanan, Pemanfaatan, Website

A. PENDAHULUAN

Pada era society 5.0 perkembangan teknologi sangat pesat, pemerintah sebagai pelayan masyarakat ditekan untuk meningkatkan inovasi dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan dengan memberikan inovasi dalam pelaksanaan *e-government*. *E-government* di Indonesia muncul pada tahun 2001, yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Instruksi ini menekankan pemerintah dalam memaksimalkan pengaplikasian teknologi informasi untuk mendorong terwujudnya *Good Governance*. Istilah *E-government* atau dikenal dengan pemerintahan berbasis elektronik menjadi hal yang lumrah diketahui berdampingan dengan peningkatan dinamika Teknologi Informasi dan Komunikasi. Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* merupakan batu lonjakan yang baru bagi pemerintahan untuk menggunkan teknologi, komunikasi dan Informasi yang diharapkan mampu mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan saat ini seperti efisiensi, efektivitas, transparansi serta akuntabilitas. *E-Government* sebagai contoh penerapan dalam kebermanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ruang lingkup pemerintahan perlu dipersiapkan dalam menunjang kesempatan dan rintangan dengan membuat pengadaan perangkat sistem jaringan teknologi nan informasi sehingga mampu dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas (Anggrahini, Rochayanti, & Sosiawan, 2008).

Jika dilihat sudah banyak organisasi pemerintahan baik tingkat tertinggi maupun terendah yang sedang mengembangkan pelayanan publik berbasis web yang didalamnya terdapat informasi umum mengenai instansi tersebut. Informasi yang dimaksud seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, bidang-bidang di dinas sosial, agenda yang dilakukan, regulasi berita serta galeri yang berisi foto dan video kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara terutama Dinas Sosial Sumatera Utara merupakan salah satu instansi yang telah mewujudkan *digital governance* berbasis website dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara telah merilis sebuah website yaitu <http://dinsos.sumutprov.go.id> namun dalam pengelolaanya yang masih kurang.

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan menggunkan website adalah cara untuk menunjukkan keberadaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara pada publik, sehingga masyarakat dapat melihat dan mengetahui apa saja

agenda yang dilakukan oleh instansi tersebut. Ini merupakan bentuk pelayanan kepada publik mendapatkan informasi yang jelas dan cepat sehingga menunjang terbentuknya pemerintahan yang transparan. Karena informasi adalah hal yang penting bagi masyarakat saat ini. Sehingga masyarakat sebagai juri dari pemerintahan sekaligus aktor dalam pemerintahan juga dapat ikut ambil bagian dalam terselenggaranya pemerintahan yang diinginkan dalam mewujudkan *goals* yang diinginkan oleh instansi tersebut. Melalui media online website, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengharapkan adanya komunikasi timbal balik dalam bentuk kritikan, dan saran melalui website tersebut.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sering menjadi topik perbincangan saat ini dimana publik menjadikan pemerintahannya yang baik menjadi sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Sistem pertanggungjawaban yang efektif dan efisien untuk terciptanya pemerintahan yang tepat dan transparan serta responsibility tentu sangat diperlukan. Menurut pendapat kami, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara juga ikut berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan membuat strategi pembenahan reformasi pelayanan masyarakat yang manual menjadi berbasis website. (Hasil wawancara dengan staff yang mengelola IT).

Untuk mendukung berjalan atau tidaknya organisasi tentu dibutuhkan publik. Dinas sosial Provinsi Sumatera Utara sebagaimana instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat tentulah membutuhkan dukungan dalam membuat ketetapan yang dibuat untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam melaksanakan program kerja yang dibuat apakah itu merugikan atau menguntungkan bagi pemerintah (Sutanta dalam Ade Chusnul, 2003).

Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara menyambut baik instruksi dari pemerintah pusat dengan membuat website untuk dinas sosial dengan menunjukkan website tersebut dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi dengan cepat. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak kendala yang dihadapi seperti informasi yang diunggah pada media sosial seperti Instagram masing kurang update sehingga masyarakat tidak dapat melihat informasi secara terbuka dan cepat. Setiap tahun jumlah pegawai yang ada terus mengalami pengurangan, contohnya saja tahun ini yang pegawai yang akan pensiun pada bulan juli mendatang 60 orang. Untuk yang mengelola di bagian website hanya 2 orang saja. Banyak pegawai yang gagap teknologi yang mengakibatkan penggunaan teknologi dalam bekerja di dinas sosial memang kurang maksimal. (hasil wawancara dari seorang pegawai di dinas sosial).

Secara sederhana pendapat dari Indrajit mengatakan bahwa website adalah alat berkomunikasi. Website berbeda dengan televisi dan radio yang menyampaikan satu pesan ke seluruh kalangan namun website lebih kepada pemberian pelayanan untuk beragam kebutuhan dan untuk beragam kalangan pula. Sehingga dapat diperjelas kembali bahwa website adalah media untuk berkomunikasi. (Indrajit, 2005)

Keberadaan website dapat membantu dan mempermudah dalam menyampaikan informasi. Website adalah hal yang sudah lazim dikenal masyarakat sehingga seharusnya pengelolaannya harus dilakukan secara benar dan baik adanya. Website dapat mendeskripsikan suatu organisasi/lembaga kepada pembacanya tentang suatu kegiatan, layanan dan lainnya. Digital government merupakan suatu kegiatan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang secara jelas dapat memaksimalkan relasi antara internal pemerintah dengan pihak-pihak dari luar pemerintah. Pemanfaatan teknologi ini diharapkan mampu memprakarsai hubungan baru, seperti adanya relasi antara pemerintah kepada publik, antar internal pemerintah dan pemerintah dengan swasta (Sutanta, 2003).

Jika kita melihat ke masa depan e-government ini tentu akan membawa hal yang sangat baik. Salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang telah berhasil dalam menggunakan e-government adalah pemerintah kota Binjai. Pemerintah Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara telah membuat sebuah pencapaian yang dapat membanggakan Sumatera Utara karena kota ini adalah yang pertama menerapkan e-Government di provinsi Sumatera Utara. Binjai sudah terhitung memiliki sebanyak 14 inovasi e-Government yang membawa pada predikat Smart City. Baru-baru ini, kota Binjai telah melakukan grand launching untuk lima aplikasi e-Government Binjai Smart City (BSC) sekaligus peresmian Binjai Command Center (BCC). Di mana salah satu aplikasi yang menjadi andalan Binjai adalah e-Masyarakat yang bisa diunduh umum di Play Store untuk perangkat android.

Banyak negara tengah berlomba untuk mewujudkan e-government dengan visi dan misi yang disejajarkan dengan pola dinamika politik sosial juga meluruskan dengan geografisnya masing-masing, tentu tujuan akhirnya adalah untuk memaksimalkan hasil output pemerintah apalagi dalam bagian penyedia pelayanan informasi bagi publik di negaranya masing-masing. Beberapa tujuan digital governance sebagai berikut: (1) Terwujudnya interaksi secara daring antara pemerintah dengan publik agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. (2) Melakukan perbaikan dan evaluasi pelayanan masyarakat pada jalan yang semakin efektif dan lebih baik sebelumnya (3) Memaksimalkan good government dan transparansi. (4) Meningkatkan pendapatan asli daerah. (Anwar & Oetoyo, 2004).

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti bagaimana Dinas sosial provinsi sumatera utara dalam mengelola website sebagai media komunikasi untuk implementasi electronic government (e-gov). Penelitian ini akan melihat berdasarkan rumusan masalah yang dibagi menjadi dua kajian:

1.1 Bagaimana pelayanan dalam pemberian informasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara?

2.1 Apakah Transparansi Pemanfaatan Website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pelayanan Publik untuk dapat Mewujudkan Good Governance?

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah dan dapat berkontribusi sebagai berikut; Pertama, menyampaikan aspirasi bagi Dinas sosial provinsi sumatera utara perihal pentingnya pemanfaatan website sebagai bagian dari salah satu cara mengaplikasikan media komunikasi untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat sebagai bentuk implementasi electronic government. Kedua, memberi masukan bagi Dinas sosial provinsi sumatera utara untuk mengoptimalkan pengelolaan website sebagai media komunikasi implementasi e-government dalam memberikan pelayanan publik.

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui metode ini maka dapatlah dijelaskan sejauh mana implementasi website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk e-Government dan sejauhmana pedaranya pada Pendidikan Islam. Sedangkan objek kajian adalah website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan domain <http://dinsos.sumutprov.go.id>. Penelitian dilakukan selama 24 hari di kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di alamat Jl. Sampul No. 138, kota Medan provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik Observasi, Wawancara, dan Studi Pustaka.

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah ini adalah: Reduksi data, bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis membuat jurnal yang tidak mubajir dalam kalimat namun melihat esensi dari tulisan ini sesuai dengan yang diinginkan. Penulis juga memepereh data dengan melakukan wawancara dan strudi purtaka. Sajian data, suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dalam hal ini penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara. Penarikan Kesimpulan

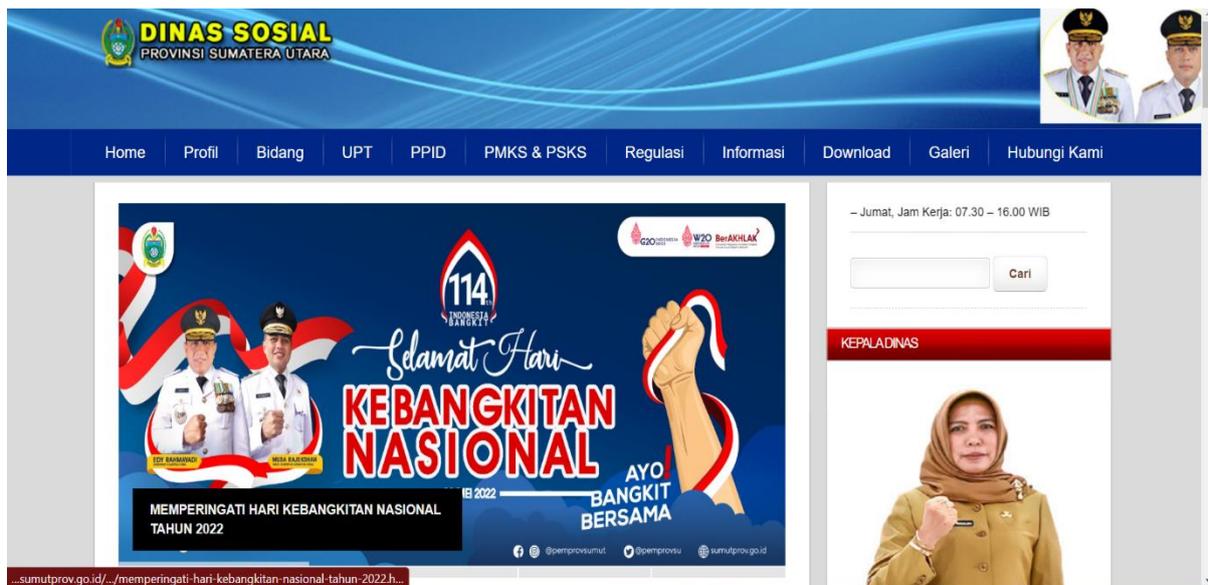
dilakukan di akhir pengumpulan data dilakukan. Sejak awal penelitiann penulis sudah berusaha untuk memahami kenyataan dilapangan sehingga dilakukan pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara <http://dinsos.sumutprov.go.id> sebagai Media Komunikasi dan Informasi Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Good Governance.

Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (InPres) No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government kemudian membuat situs (Website) resmi dengan domain <http://dinsos.sumutprov.go.id> . Website ini dapat dikategorikan sebagai website pemerintahan karena menggunakan domain berinisial “go” yang berasal dari kata “government” (pemerintah) yang berarti situs ini dikelola pemerintah setempat dan inisial "id" menandakan Negara yang mengelola website tersebut yaitu Indonesia. Pemanfaatan Website oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merupakan hasil kerja yang dilakukan oleh Pengolahan Data Bagian Elektronik dan Hubungan Masyarakat (HuMas) sehingga hasil kerja yang ada tersebut memiliki tugas pokok yang berbeda-beda pula. Terdapat bagian pengelolaan data yang memiliku tugas untuk mengelola website serta melakukanupdate data. Slain itu terdapat bagian pemeritaaan yang mengupload hasil kerja yang ada dan bagian lainnya adalah dokumentasi yang bertugas untuk mendokumnetasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi sumatera utara.

Website Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara terdapat 3 kolom. Kolom pertama diatas yang berisi menu-menu seperti Home, Profil, Bidang, UPT, PPID, PMKS & PSKS, Regulasi, Informasi, Download, Galeri, dan Hubungi Kami. Kolom pada bagian kiri di bawah kolom pertama berisi Headline, Artikel, Pengumuman, Galeri Foto, serta Galeri Video. Kolom sebelah kanan berisi mengenai informasi Kepala Dinas, Berita, Arsip Berita, Download, Link Terkait, Peta Lokasi, Opini Publik, serta Statistik Pengunjung.



Gambar 1. Tampilan website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara

Layanan yang ditawarkan pada website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, pada hakekatnya bertujuan dalam memanfaatkan peluang agar menyajikan kesempatan yang besar kepada publik untuk memberikan argumen ataupun aspirasi, baik dalam penyampaian pendapat, kritik dan saran, dan keluhan melalui fasilitas Laport. Keikutsertaan masyarakat pada website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan masih terasa kurang karena jumlah pengunjung website mulai ditayang mulai tahun 2018 sampai perMei 2022 berdasarkan data statistik yang tercatat keseluruhannya 51.188 pengunjung. Pengelolaan website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara masih kurang menarik perhatian masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan pemerintah.

Hal ini tentu bukan hal yang baik, tingkat partisipasi yang rendah dari masyarakat yang membuat jalinan antara pemerintah dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Bahkan sering timbul anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintahan belum terbuka kepada masyarakat. Sebab lambatnya kinerja tindak lanjut dari keluhan masyarakat sehingga seakan-akan tidak berpihak penuh pada masyarakat luas. Selain itu partisipasi dari masyarakat, menurut Dodo (Staf Subbag Bina Program) selaku pengelola website mengatakan:

“Website Dinas Sosial di buat oleh pihak ketiga, website tersebut belum ada perkembangan dan belum ada pemasukan, didalam website terdapat 17 UPT, website berawal dari dibuat sampai sekarang masih data yang lama dan belum ada di update sama sekali, hambatan terberatnya belum ada sumber manusia yang mempuni untuk mengelola website dan secara spesifik orang yang khusus fokus untuk memegang website ini belum ada. Saya belum bisa mengurus website ini dikarenakan saya juga

dibebankan hal penyusunan anggaran. Hanya instruksi dan perintah dari Kepala Dinas dan Informasi Komunikasi (Infokom) serta dari pihak SPBE Provinsi Sumatera Utara untuk sekedar tayang atau menginput data yang diperintahkan, untuk diluar dari itu seperti berita-berita dan data- data yang lain kurangnya waktu. Website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dinobatkan sebagai website OPD dengan pengunjung paling sedikit dan terbengkalai di Provinsi Sumatera Utara. Poin Pentingnya adalah tidak ada Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola website tersebut. Saya ikut merancang 40% dari website tersebut seperti maintance dengan dibantu oleh pihak ketiga, untuk saat ini kerusakan ada di servernya yang tiba-tiba ada debu, dan pada tahun 2019 diserang oleh hacker, tidak bisa kita lacak alamat IP nya dan alamat Linknya. Perbaikan memakan waktu sekitar seminggu. Pada tahun 2019 website dibangun ulang. Website ini tidak pernah dirapatkan dan dibahas dalam masalah rapat di Dinas Sosial, bisa dikatakan website ini website yang terbengkalai, jika ingin membuka e-mail Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara harus berhubungan dengan pihak INFOKOM contoh ada pengunjung yang menginput keluhan bisa melalui e-mail hanya saja dinas sosial harus berkoordinasi dengan Infokom untuk membalasnya. Nomor telepon Dinas Sosial Sumatera Utara juga sudah tidak dapat digunakan karena sudah lama tidak diaktifkan kembali.”



Gambar 2. Sesi Wawancara dengan Bapak Dodo (Staf Subbag Bina Program)

Sesuai dengan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kurangnya minat masyarakat dalam ikut ambil bagian dalam program yang dibuat oleh pemerintah rendah dan respon pemerintah juga terkesan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga penerapan e-government yang diharapkan mampu memberikan informasi yang terbaru terkini serta menyangkutkan publik dalam mengambil keputusan belum dapat terlaksana. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat yang artinya transparansi antara pemerintah dengan masyarakat belum terlaksana dengan baik. Tersedia dua cara yang dimanfaatkan untuk menerapkan pelayanan interaktif, kedua cara itu antara lain : Cara pertama adalah bentuk yang dinamakan portal di mana situs tersebut menampilkan fasilitas berselancar bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi yang cukup detail. Jenis yang kedua yaitu pemerintah menyediakan fasilitas di mana publik bisa melakukan komunikasi dua arah dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti Chatting, teleconference, web tv) maupun tidak langsung (melalui e-mail, frequent ask questions, newsletter, mailing list) (Indrajit, 2006:31). Website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ini hanya menyediakan cara pertama untuk melakukan pelayanan dan itu pun masih belum diperbaharui dengan data yang terbaru. Sebagai contoh Fitur PMKS dan PSKS yang seharusnya di perbaharui setiap bulan dalam tahap ini masih belum ada perubahan dari awal pembuatan website tersebut dikarenakan data yang ada tidak sinkron dengan data yang ada di kota/kabupaten.

Transparansi Pemanfaatan Website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk digitalisasi pelayanan publik di dinas sosial provinsi sumatera utara untuk Mewujudkan Good Governance

Transparansi atau keterbukaan adalah sesuatu yang penting dalam menyampaikan informasi. Dengan konsep e-government tentu saja mengharuskan sebuah keterbukaan dalam mendorong informasi yang transparan dan jelas. Menurut Booz Allen dan Hamilton transparansi merupakan apakah pemerintah dalam hal ini mendorong keterbukaan informasi menuju proses transparansi dalam pemerintahan (Indrajit, 2006). Transparansi adalah satu prinsip penting dalam instansi pemerintahan. Prinsip ini menjamin adanya keterbukaan dalam segala informasi yang berkaitan dengan instansi terkait secara tepat waktu dan bersipat pasti.

Meskipun dalam transparansi masih dirasa belum maksimal, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara merasa bahwa keterbukaan dalam memberikan informasi mengenai performance-nya sudah transparan, karena Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memberikan

informasi dengan jelas mengenai pelayanan, tupoksi, rancangan kerja, hasil kinerja dan kegiatan kerja yang telah dilaksanakan di halaman utama websitenya.

Bagian Pengelolaan Data elektronik sebagai fasilitator kegiatan OPD Dinas Sosial terkait transparansi informasi melalui website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara hanya mampu memberikan penyampaian informasi sebatas agenda pemerintah yang berkaitan dengan output kerja pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. Segala Informasi selain lingkup tugas dan fungsi Dinas Sosial bukan menjadi wewenang Bagian Pengolahan Data elektronik sebagai bahan pemberitaan dalam website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, karena berkaitan dengan reputasi pencitraan OPD sendiri.

Pengelolaan perubahan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dengan perencanaan yang jelas, berkelanjutan untuk mencapai target yang diinginkan. Adapun kriteria manajemen perubahan menurut Booz Allen dan Hamilton di antaranya, “Strategi pengembangan; Kualitas kontrol dan review; Keterlibatan dan motivasi dari pegawai.” (Indrajit, 2006)

Dari yang disampaikan diatas yang paling penting yaitu perencanaan awal dan pengembangan dari penggunaan website OPD Dinas Sosial yang diharapkan mampu memberoikann pelayanan dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin. Pemanfaatan website OPD Dinas Sosial adalah rencana awal pemerintah daerah agar informasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah daerah dapat sampai ke masyarakat dengan baik dan tepat sasaran. Selain itu, website ini juga dapat memberikan masyarakat kemudahan dalam mengakses informasi yang ada dalam mendapat info tentang OPD Dinas Sosial.

Setelah berjalannya waktu website Dinas sosial saat ini dikelola oleh pihak luar yang memiliki kemampuan IT yang baik. Namun demikian dinas pada Bagian Pengolahan Data Elektronik masih memiliki penguasaan penuh untuk mengelola website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dalam hal pengelolaan konten isi dari website yang dikelola. Keterlibatan seluruh aparatur sipil negara dari Bagian Pengelolaan Data Elektronik yang menjadi faktor utama dari pengelolaan update Informasi.

Pengelolaan website dalam menunjang e-government perlu adanya pengawasan yang ketat dan dilakukan secara berkala. Proses monitoring dan pengendalian yang dilakukan meliputi: memperbaharui rencana kegiatan pemerintah kota dan informasi, pengolahan input argumen dari menu aspirasi yang dijadikan bahan evaluasi bulanan, dan pengendalian perangkat lunak dan jaringan setiap dua minggu sekali. Dalam hal ini pengendalian dan pengawasan dari atasan harus selalu ada.

Bagian Pengolahan Data Elektronik OPD Dinas Sosial provinsi Sumatera Utara belum memiliki tenaga ahli IT yang handal, namun hanya terdapat sebagian aparatur saja yang terbilang mumpuni dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, anggaran yang diberikan untuk mendukung dalam penerapan e-govermenet masih kurang cukup. Bukti nyata yang dilihat banyak anggaran yang dicairfkan tidak pasti. Tentunya sumber daya manusia dan factor pendukung seperti anggaran adalah hal yang memengaruhi dalam keberhasilan penerapan e-government di sumatera utara. Pimpinan di sumatera uatra harus mampu mendukung keberhasilan pemerintahan berbasis elektronik ini untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut pendapat Budhirianto bahwa kesuksesan penerapan e-government di suatu daerah sangat ditentukan oleh komitmen gubernur, walikota dan bupati daerah yang bersangkutan. (Budhirianto, S., 2012).

Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pada Pendidikan Islam

Dengan seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi informasi kian pesat, khususnya internet menguatkan berkembangnya layanan informasi yang lebih baik dalam institusi pendidikan. Terlebih pada pendidikan keislaman. pemanfaatan teknologi informasi diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut electronic school (e-school) dan e University (e-University). Pengembangan electronic school (e-school) dan e University (e-University) bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah dapat memberi layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui internet dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan, sehingga memberikan informasi bagi yang sulit mendapatkannya karena kendala ruang dan waktu (Ridwan, 2018: 844).

Teknologi internet mempermudah setiap layanan pada setiap lini dunia pendidikan Islam. Melihat pada sekolah atau perguruan tinggi dengan e universitynya, sehingga penyelenggaraan dan layanan informasi yang lebih baik pada siswa atau mahasiswa dan masyarakat luas. Layanan yang paling mungkin adalah penyediaan materi kualiah atau pelajaran online, tugas online, pembayaran administarsi online, reseach, perpustakaan dan semua kebutuhan yang menyangkut keterpaduan dan kebutuhan akan layanan perlu menggunakan teknologi informasi (internet) (Ridwan, 2018: 844).

Era digital memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan teknologi dan komunikasi. Komplexitas kehidupan digital menuntut manusia untuk merubah dengan sistem yang lebih fektif dan efesien. Kondisi ini juga meluas kepada peluang dan tantangan Manajemen Pendidikan Islam.

Perkembangan digitalisasi umumnya berpusat pada kemajuan IPTEK terutama dalam kemajuan teknologi dan komunikasi. Wujudnya perdagangan bebas di pasar global (market global), mudahnya bekerjasama antar regional dan international dengan inovasi-inovasi produk yang diciptakan (Alan Suud Maadi, 2018: 744).

Munculnya teknologi digital dalam skala besar mampu membuka pandangan baru untuk mengembangkan peluang pendidikan, kesetaraan akses pendidikan bagi siapa saja tanpa diskriminasi. Dunia digital yang bisa dioperasikan dimanapun selama ada jaringan internet dan perangkat keras yang memadai membuka peluang untuk mengembangkan pendidikan secara virtual yang mungkin sebelumnya belum terbayangkan. Dengan munculnya alat ini, pendidikan dapat didistribusikan secara merata tanpa penggunaannya tidak terbatas ruang dan waktu. Mobile technology berhasil dirancang sebagai alat yang dapat mengubah pola pikir manusia. Cara berpikir setiap individu mengalami perubahan drastis dan sulit dikendalikan. Dengan alat ini setiap orang dapat mengeksplorasi kemampuan berfikirnya untuk mengembangkan kemampuan diri semaksimal mungkin sehingga jika yang bersangkutan menghasilkan sintesa pemikiran atau produk yg dapat didistribusikan di dunia maya tanpa ada halangan apapun. Device ini memperkenalkan budaya pendidikan yang tidak terkendali dan memungkinkan pelayanan pendidikan baru yang belum ada. Alat ini secara potensial menyediakan kemudahan yang lebih efektif, terjangkau dan dapat menjangkau lokasi yang belum tersentuh pendidikan konvensional (Shulhan Alfinnas, 2018: 807).

Teknologi dalam pendidikan merupakan sarana dan keperluan sebagai penunjang terlaksananya kegiatan pendidikan. Teknologi pendidikan juga merupakan proses sistematis dalam usaha mendidik atau membelajarkan peserta didik. Pengertian teknologi pendidikan bukan terbatas pada alat pendidikan, namun lebih pada metode atau cara dalam praktik pendidikan dengan langkah-langkah efektif terhadap inovasi dalam pembelajaran yang lebih sistematis ke depannya (Rochmad, 2021: 45).

Dengan berjalannya waktu dan dengan meningkatnya kemajuan teknologi maka pendidik dituntut untuk bisa dan dapat menyesuaikan diri dan harus mampu bersaing dengan memanfaatkan teknologi yang ada, terkhusus di bidang pendidikan Islam dituntut untuk mampu memaksimalkan potensi positif yang terdapat pada dunia digital sehingga meminimalisir aspek negatif yang ditimbulkan dari munculnya media tersebut. Dan seyogyanya seorang pendidik mampu melakukan inovasi mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan dunia digital. Kemajuan digitalisasi yang menguasai hampir seluruh dimensi kehidupan tidak mengenal tua mau pun muda atau ataupun orang dewasa sehingga tidak dapat dielakkan lagi. Menjauhkan anak-anak dari bersinggungan dengan dunia maya bukan

pilihan yang terbaik tetapi membiarkan mereka terlalu bergantung dengan segala hal yang berhubungan dengan dunia informasi digital tanpa kontrol dan pengarahan merupakan keputusan yang berisiko tinggi. Langkah terbaik bagi orang tua atau para pendidikan adalah dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat dan sarana untuk mengembangkan pendidikan mereka dengan menyusun strategi konten dan model pembelajaran berbasis digital tentu dengan visi besar sebagai sarana mewujudkan generasi muslim yang memiliki pengetahuan yang luas.

Digitalisasi pendidikan dan segala manfaatnya dapat dicapai dengan diawali melalui adanya digitalisasi manajemen sekolah yang sesuai. Digitalisasi manajemen sekolah merupakan bagian dari digitalisasi pendidikan yang termasuk di dalamnya yaitu perangkat dan platform pembelajaran serta tenaga pendidik yang dapat mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran yang efektif.

1. KESIMPULAN

Pemanfaatan teknologi khususnya dalam penggunaan website sebagai sarana informasi merupakan salah satu adaptasi yang baik di era gempuran teknologi yang semakin pesat. Pemerintah selaku pemberi pelayanan sudah selayaknya mengikuti perkembangan era yang kian menuju masa serba digital. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sudah berusaha untuk memanfaatkan bentuk dari teknologi dalam hal ini website sehingga dapat memudahkan mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Namun kenyataannya, kendala-kendala kerap kali menghambat penggunaan website ini sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal. Kendala-kendala tersebut sejatinya muncul dari dalam diri instansi itu sendiri dan baik juga muncul dari luar instansi. Pemanfaatan website bukanlah sesuatu yang mudah untuk diaplikasikan. Sebagaimana website adalah teknologi yang membutuhkan perawatan berkala, untuk itu website harus diperhatikan secara baik dari waktu ke waktu bukan semata-mata hanya dibiarkan begitu saja.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara memiliki website yang masih terhitung cukup muda. Sejak 2019 ditampilkan, website ini masih memiliki tampilan yang sama dan sudah tidak relevan lagi dengan website yang berkembang pada saat ini. Interaksi antara pengguna website merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah website. Bagaimana kemudahan dalam penggunaan website menjadi bagian yang

krusial. Adapun website yang saat ini dikelola oleh Dinas Sosial masih dirasa kurang relevan untuk saat ini. Jumlah informasi yang diterbitkan pun tidak begitu banyak sehingga masyarakat merasa website ini tidak memberikan dampak yang besar. Perawatan berkala juga tidak begitu diperlukan sebab website yang saat ini digunakan juga jarang sekali dikembangkan yang mengarah pada terbengkalainya website. Dengan rata-rata pengunjung yang sedikit per-hari-nya menandakan bahwa website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara masih kurang efektif untuk sebuah media informasi dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan.

Adapun solusi yang bisa diambil adalah merekrut sumber daya manusia yang mampu mengelola website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara secara penuh dan berkala. Pemanfaatan sumber daya manusia yang mumpuni merupakan salah satu solusi yang paling tepat mengingat kurangnya pegawai yang mumpuni dalam mengelola website Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Dengan terpenuhinya sumber daya manusia yang mumpuni, pengelolaan website akan semakin baik dan pemanfaatan teknologi dalam bentuk website di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara pun akan semakin efektif.

Sedangkan dalam dunia pendidikan terlebih pendidikan Islam di era digital saat ini digitalisasi yang bertujuan untuk membantu dan menopang membentuk generasi Islam yang smart dan memiliki keterampilan lebih agar mampu bersaing dan melangsungkan kehidupan dengan baik, aman, sejahtera dan harmonis sesuai dengan zamannya saat ini. Kemudian dapat dan mampu mewujudkan cita-cita luhur tersebut, terlebih dunia pendidikan dan terkhusus pada bidang pendidikan Islam sangat dituntut untuk mampu memaksimalkan dan memanfaatkan potensi positif yang terdapat pada dunia digital sehingga mampu meminimalisir dan mencegah aspek negatif yang ditimbulkan dari media tersebut, juga mampu melakukan inovasi desain pembelajaran dengan memanfaatkan dunia digital tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

-Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*.

Yogyakarta: ANDI.

-Indrajit, Richardus Eko; Dudy, Rudianto; Akbar, Zainuddin. 2005. *e- Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan*

Dunia. Yogyakarta: ANDI.

Ridwan. (2018). Pendidikan Islam Dan Teknologi Digital Serta Efektivitasnya Dalam Mendukung Teory Taxonomy Bloom. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 7(1).

Rochmad. (2021). Pemanfaatan Digitalisasi Dalam Pendidikan Islam Di Masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). *JURNAL PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelegualitas*

Alan Suud Maadi. (2018). Digitalisasi Manajemen Pendidikan Islam Dan Ekonomi Syariah Di Perguruan Tinggi. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 7(1).

Shulhan Alfinnas. (2018). Arah Baru Pendidikan Islam Di Era Digital. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 7(1).

Perundangan dan Dokumen

-Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

-Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

